

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN  
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

**Alphons M R Putra**

**NIM : 01 2114 104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2007**

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN  
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

**Alphons M R Putra**

**NIM : 01 2114 104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2007**

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN  
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT



Oleh:

**Alphons M R Putra**

NIM : 01 2114 104

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing I

Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt.

Tanggal: 1 November 2007

Pembimbing II

Ir. Drs. Hansiadi V.H, M.Si., Akt

Tanggal: 19 November 2007

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN  
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Alphons M R Putra**

NIM : 01 2114 104

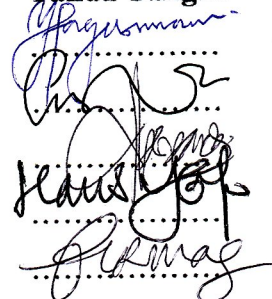
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 10 Desember 2007  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Lengkap**

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt.
Anggota	Ir. Drs.Hansiadi. Y. H, M.Si., Akt
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

**Tanda Tangan**

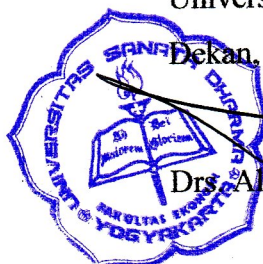


Yogyakarta, 22 Desember 2007

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan.



Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

*"Persembahkanku teruntuk Orang tua dan kedua Kakakku yang sudah memberikan semua kemampuannya demi cita-cita dan masa depanku. . . "*

*Salam Hormat dan Terima Kasihku*

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : ALPHONS M R PUTRA

Nomor mahasiswa : 012114104


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul : ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 6 Maret 2008

Yang menyatakan

  
ALPHONS M R PUTRA





UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1  
TAHUN 2002 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 10 Desember 2007. adalah  
hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi  
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil  
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol  
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang  
saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian  
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan  
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,  
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil  
tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan  
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya  
sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya  
terima.

Yogyakarta, 10 Desember 2007  
Yang membuat pernyataan,



Tanda Tangan

(Alphons M R Putra)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah kepada Allah yana Maha Kuasa atas penyertaan, pengajaran dan kekuatan yang telah diberikan selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002“** dapat terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Ir. P.Wiryono P., S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs.Alex Kahu Latum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Para Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang membantu proses administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Drs. Y.P Supardiyono, M.Si, Akt., selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menulis dengan baik.



4. Ir. Drs. Hansiadi.Y.H, M.Si., Akt., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menulis dengan baik.
5. Orang tua dan keluarga yang sangat mendukung lewat motivasi dan nasehat yang sangat bermanfaat.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi NTT beserta staf yang telah memberikan penulis data dan informasi yang sangat diperlukan.
7. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi khususnya angkatan 2001 yang senantiasa saling mendukung dan memberikan solusi yang bermanfaat.

Akhir kata penulis memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang dapat dipahami, karena penulis sangat menyadari kekurangan sebagai seorang manusia yang tidak sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan menyimaknya.

Yogyakarta, September 2007

  
Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II. LANDASAN TEORI .....	6
A. Pajak.....	6
B. Pendapatan Asli Daerah .....	12
C. Pajak Daerah .....	14
D. Pajak Kendaraan Bermotor .....	16

BAB III. METODE PENELITIAN .....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Data Yang Diperlukan .....	24
F. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV. GAMBARAN UMUM PROPINSI NTT .....	30
A. Geografi .....	30
B. Kependudukan .....	31
C. Kondisi wilayah .....	33
D. Perekonomian.....	34
E. Pemerintahan.....	36
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Deskripsi Data.....	38
B. Analisis Data .....	40
C. Pembahasan.....	49
BAB VI. PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Keterbatasan penelitian .....	54
C. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN.....	59

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Nama Kabupaten dan Ibukotanya.....	36
Tabel 5.1 : Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Perda No.1 tahun 2002.....	37
Tabel 5.2 : Pendapatan Asli Daerah sebelum Perda No.1 tahun 2002....	37
Tabel 5.3 : Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Perda No.1 tahun 2002.....	37
Tabel 5.4 : Pendapatan Asli Daerah sesudah Perda No.1 tahun 2002 ....	37
Tabel 5.5 : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	40
Tabel 5.6 : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	42
Tabel 5.7 : Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebelum dan Setelah Peraturan Daerah No.1 Tahun 2002 .....	44
Tabel 5.8 : Pengujian Nilai Distribusi U.....	45

## ABSTRAK

### ANALISIS KONTRIBUSI DAN PERBEDAAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT

Alphons M R Putra  
NIM : 01 2114 104  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada pada tahap pembangunan atau sering disebut sebagai negara berkembang. Modal utama pembangunan saat ini ialah anggaran pembangunan yang banyak diperoleh dari sektor pajak. Terdapat berbagai macam pungutan pajak di Indonesia, salah satunya ialah Pajak Kendaraan Bermotor. Di tiap-tiap Propinsi di Indonesia, terdapat Peraturan Daerah yang mengatur kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian halnya yang dibuat oleh Pemerintah Nusa Tenggara Timur, yakni dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuannya agar pemerintah tersebut secara jelas dan sesuai hukum, dapat menarik pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Tujuan penulisan ini adalah mengetahui besarnya prosentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002.

Hasil perhitungan prosentase kontribusi menunjukkan, telah terjadi fluktuasi tingkat prosentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 1998 sampai tahun 2005. Diantaranya telah terjadi peningkatan kontribusi mencapai 33,5% pada tahun 2000 dan terjadi penurunan kontribusi menjadi 17,5% pada tahun 2002.

Pada pengujian hipotesis dengan Man-Whitney U Test untuk mengetahui tingkat perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah, diperoleh nilai *asympt.sig(2-tailed)* sebesar 0,021 yang berarti nilai ini lebih kecil dari nilai kritis 0,05, sehingga keputusan yang diambil ialah menolak  $H_0$ . Berdasarkan keputusan tersebut, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

## ABSTRACT

ANALYSIS OF CONTRIBUTION AND DIFFERENCES OF VEHICLE TAX  
REVENUE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF  
REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE  
NO.1 YEAR 2002 ABOUT VEHICLE TAX  
A Case Study at Regional Revenue Office in East Nusa Tenggara Province

Alphons M R Putra  
NIM : 01 2114 104  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2007

At present, Indonesia is known as one of development countries in the world. The main capital for the development in this country comes from the taxation. There are various tax objects, and the ownership of a vehicle is one of them. In order to administrate this taxation, every province in Indonesia issued a particular regulation, which in East Nusa Tenggara province, it is known as Regional Regulation no.1 year 2002. The purpose of this regulation is to enable the government to legally collect the tax on the ownership of a vehicle within the province.

The aims of this research were firstly to know the percentage of contribution of vehicle tax revenue to the regional income, and to compare the amount of the vehicle tax revenue in this province, before and after the implementation of regional regulation no.1 year 2002.

The result showed that there was a fluctuation on the level of percentage of vehicle tax's contribution to the regional income, from the year of 1998 to 2005. It was revealed that there was an increase up to 33.5% in 2000 and a decrease down to 17.5% in 2002.

The test of hypothesis using Man-Whitney U Test, to know the difference in vehicle tax revenue before and after the implementation of regional regulation no.1 year 2002, resulted the value of *asympt.sig (2-tailed)* as 0.021 which meant that the value was bigger than the critical value 0.05. Hence the  $H_0$  was rejected. Based on that decision, it was concluded that there was a significant difference between the vehicle tax revenue before the implementation of regional regulation no.1 year 2002 and the vehicle tax revenue after the regulation was imposed.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam merencanakan pembangunan suatu daerah agar lebih maju dan dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maka pemerintah akan berupaya menghasilkan pendapatan atau penerimaan yang tinggi sehingga seluruh perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Terutama pada masa otonomi daerah saat ini yang sudah dicanangkan sejak dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membuat tiap Pemerintah Daerah berusaha memperoleh pendapatan asli daerah sebesar-besarnya. Pendapatan yang dimaksud antara lain dari penerimaan asli daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah tersebut.

Agar keinginan menghasilkan penerimaan asli daerah yang besar dapat tercapai, diperlukan suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan setiap peraturan dan kebijakan oleh pemerintah. Terimplisit dalam kerjasama tersebut ialah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait yakni hak pemerintah dalam menentukan dan memungut pajak serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak yang telah ditentukan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak saat ini sangat

dibutuhkan, karena pemerintah membutuhkan sebagian besar dana penyelenggaraan pembangunan dari sektor pajak.

Pada masa pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, pendapatan asli daerah dari sektor pajak merupakan modal utama pembangunan di daerah. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar terhadap penerimaan asli daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diperuntukan bagi pembangunan daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah merasa sangat penting membuat dan menyesuaikan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu sampel ialah pada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang setiap dua sampai empat tahun sekali perlu merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Pada tahun 1998, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dari kedua Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan terdapat perbedaan penetapan tarif pajak yang cukup besar sehingga Peraturan Daerah yang baru tersebut lebih dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti sejauh mana kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga yang baik dalam membantu penyelenggaraan pembangunan. Dikhususkan pada daerah Nusa Tenggara

Timor, karena telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat cepat pada daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini, dan juga telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menggantikan Peraturan Daerah yang lama dan dianggap sudah tidak dapat diterapkan lagi pada saat ini. Harapan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, karena di tinjau dari isi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor terdapat beberapa perubahan yang penting, misalnya ketentuan tarif pajak kendaraan bermotor pada peraturan daerah tersebut sedikit mengalami kenaikan dari tarif pajak kendaraan bermotor pada peraturan daerah sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak. Oleh sebab itu penelitian ini sangat berguna bagi penilaian dan motivasi selanjutnya kepada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan langkah-langkah yang di ambil dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan

Bermotor?

2. Apakah ada perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut :

1. Seberapa besar sumbangan atau kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui besarnya perbedaan atau selisih antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam membuat keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma sebagai tambahan pustaka yang dapat bermanfaat di kemudian hari sebagai acuan penelitian selanjutnya maupun bagi penelitian yang serupa.
3. Bagi penulis sendiri sebagai tugas akhir untuk menempuh ujian akhir kelulusan.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Uraian berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Landasan Teori**

Uraian berisi tentang studi pustaka sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data dan menganalisa masalah.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Uraian mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **Bab IV : Gambaran Umum**

Uraian tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, struktur pemerintahan, sumber daya manusia dan sumber daya alam.

### **Bab V : Analisis Data dan Pembahasan**

Uraian tentang hasil penelitian, analisis data serta pembahasan masalah berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **Bab VI : Penutup**

Dari hasil penelitian tersebut akan diuraikan beberapa kesimpulan disertai beberapa saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Prakosa (2005: 1), pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002: 1).

Sedangkan menurut Adriani, pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Aini, 1985: 1).

##### **2. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pajak yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia, yakni :



a. Asas Wilayah (territorial)

Pemungutan pajak didasarkan atas domisili atau dimana seseorang bertempat tinggal

b. Asas Kebangsaan (nasionalitas)

Pemungutan pajak didasarkan dimanapun seseorang tersebut berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri.

c. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber di suatu negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber itu berada.

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal tiga cara pemungutan pajak yakni:

a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak berdasarkan keadaan obyek yang sesungguhnya, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak yang lebih realistis. Sedangkan kelemahannya ialah perhitungan pajak dan pembayarannya baru dapat dilakukan setelah akhir periode yakni pada saat keadaan nyata obyek pajak diketahui secara pasti.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan obyek pajak tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Keunggulan stelsel ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sebaliknya kelemahannya pajak ini tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

c. Stelsel campuran

Untuk mengatasi kelemahan dari kedua stelsel diatas, maka dalam pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar tambahan atau kekurangan pajak dan sebaliknya dikembalikan apabila pajak sesungguhnya lebih kecil dari pajak menurut anggapan.

2. Pembagian Hukum Pajak

Hubungan pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni :

a. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subyek) berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak.

Contoh : undang-undang Pajak Penghasilan

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil) hukum ini memuat antara lain :
  - 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  - 2) Hak-hak fiksus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
  - 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### 3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2002: 1) terdapat dua fungsi pajak yang di akui saat ini yakni :

#### a. Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak didasarkan sebagai pemenuhan sumber dana atau anggaran bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pemungutan Pajak didasarkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada saat ini fungsi pajak yang lebih menonjol ialah fungsi mengatur. Disebabkan pemerintah tidak ingin agar pajak menjadi beban yang berat bagi masyarakat. Sehingga muncul beberapa perubahan tarif pajak dan memberikan pengecualian-kecualian dan keringanan pajak. Contoh konkrit adanya pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan barang-barang mewah, Sebaliknya pemerintah memberikan keringanan bagi pengekspor dengan menetapkan tarif pajak 0% untuk ekspor bertujuan agar mendorong produk Indonesia masuk ke pasar dunia.

4. Teori yang mendukung pemungutan pajak

Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Prakosa, 2005: 5):

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyatannya tidak ada. Selain itu besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing

orang. Teori ini juga dikenal sebagai *benefit approach theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *ability to pay approach theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

5. Pengelompokan Pajak

Dalam praktek pemungutannya pajak dapat dikelompokkan menjadi macam-macam pajak yakni seperti yang dikutip Mardiasmo (2002: 5):

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
  - 2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyek, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai pasal 157 sumber Pendapatan Daerah ialah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:
  - a. Hasil Pajak Daerah, seperti:
    - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
    - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    - 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan
  - b. Hasil Retribusi Daerah, seperti:
    - 1) Retribusi Jasa Umum
    - 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan



- 3) Retribusi Jasa Pelayanan Tera / Tera Ulang
  - 4) Retribusi Jasa Usaha
  - 5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila
  - 7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
  - 8) Retribusi Perizinan Tertentu
  - 9) Retribusi Izin Trayek
  - 10) Retribusi Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- d. Lain-lain PAD yang sah, seperti:
- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
  - 2) Penerimaan Jas Giro
  - 3) Penerimaan Bunga Deposito
  - 4) Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau
  - 5) Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
  - 6) Pendapatan denda Pajak
  - 7) Pendapatan denda Retribusi
  - 8) Pendapatan dari Pengembalian
  - 9) Sumbangan pihak ketiga
2. Dana perimbangan
- Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk juga ialah hibah atau dana darurat dari pemerintah.

### **C. Pajak Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari empat hal yaitu (Prakosa 2005: 5):

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi

hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil (Prakosa 2005: 2). Berikut ini adalah jenis Pajak Daerah yakni terdiri atas :

#### 1. Pajak Propinsi

Pajak propinsi ialah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini seperti :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Kendaraan di atas Air
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### 2. Pajak Kabupaten atau Kota

Pajak Kabupaten atau Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang termasuk Pajak Kabupaten

atau kota antara lain:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan dan Reklame
- d. Pajak Parkir
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

#### **D. Pajak Kendaraan Bermotor**

Salah satu jenis Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Prakosa 2005: 105). Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 2 tahun 1998 dan Nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

1. Berdasarkan jenisnya maka kendaraan bermotor dibedakan atas :
  - a. Mobil berpenumpang seperti: sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus dan lain-lain.

- b. Mobil barang atau beban seperti: pick-up, truk, van, double cabin tangki dan sejenisnya.
- c. Kendaraan khusus (alat-alat berat) seperti: mixer, trailer dan sejenisnya.
- d. Kendaraan beroda dua atau tiga tanpa gandengan yang di sebut sepeda motor atau sepeda yang digerakan dengan tenaga mesin.

2. Berdasarkan fungsinya maka kendaraan bermotor dibedakan menjadi :

- a. Kendaraan umum merupakan semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran serta menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam.
- b. Kendaraan tidak umum atau pribadi merupakan semua kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang tetapi tidak dipungut bayaran serta menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat hitam dan huruf putih.

3. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dikecualikan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- c. Subyek pajak lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

#### 4. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

#### 5. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

##### a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :

- 1) isi silinder dan / atau satuan daya
- 2) penggunaan kendaraan bermotor
- 3) jenis kendaraan bermotor
- 4) merek kendaraan bermotor
- 5) tahun pembuatan kendaraan bermotor
- 6) berat total kendaraan bermotor
- 7) banyaknya penumpang yang diizinkan
- 8) dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) tekanan gandar dibedakan atas jumlah sumbu/As, roda dan berat kendaraan bermotor.
- 2) jenis bahan bakar kendaraan bermotor dibedakan antara lain Solar, Bensin, Gas, Listrik dan Tenaga Surya.
- 3) jenis penggunaan kendaraan bermotor adalah sebagai kendaraan umum atau kendaraan pribadi.
- 4) tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor dibedakan antara lain jenis mesin yang 2(dua) tak atau 4(empat) tak dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Yang dimaksud harga pasaran umum ialah rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjualan kendaraan bermotor.

#### 6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ialah sebesar 1,5%. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor terutang diperoleh dari mengalihkan tarif tersebut dengan nilai jual kendaraan bermotor dan atau dengan bobot yang

mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pajak Kendaraan Bermotor besarnya tarif pajak adalah sebagai berikut :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh : Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah :

$$\text{Rp. } 100.000.000,00 \times 1,2 = \text{Rp. } 120.000.000,00.$$

#### 7. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas)



bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena suatu hal dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi. Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur. Pembayaran pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ialah surat ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), ialah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), adalah surat ketetapan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- d. Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang.
- e. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

- f. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD.
- g. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap suatu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk studi kasus dengan cara mengamati suatu kasus kemudian menganalisisnya serta mengambil suatu kesimpulan atas hasil analisis.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama dua minggu yakni pada pertengahan sampai akhir bulan Juni tahun 2007.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

1. Subyek penelitian ini adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur

2. Obyek penelitian ialah data Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 1998 sampai tahun 2005.

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

1. Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2. Dokumentasi dengan mengumpulkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 1998 sampai tahun 2005.
3. Observasi yakni pengamatan langsung pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT, mengenai cara pengelolaan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tiap kabupaten.

#### **E. Data Yang Diperlukan**

1. Gambaran umum tentang Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Propinsi NTT tahun 1998 sampai tahun 2005.
3. Data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi NTT tahun 1998 sampai tahun 2005.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Pembahasan masalah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung prosentase kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005 dengan rumus :

$$\% \text{ Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PKB}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Prosentase kontribusi dihitung dengan cara membagi jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah dikalikan seratus persen.

## 2. Menghitung peningkatan dan penurunan prosentase kontribusi

Prosentase kontribusi meningkat atau menurun dihitung dari selisih antara kontribusi (%) tahun 1998 dan tahun 1999, tahun 1999 dan tahun 2000 dan tahun 2000 dan tahun 2001 dan seterusnya sampai tahun 2005, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :

Tahun Anggaran	Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kontribusi Meningkat/ Menurun
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				

Selanjutnya teknik analisis untuk masalah kedua dilakukan dengan uji normalitas terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui keselarasan penyebaran pendapatan. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji beda untuk mencari rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah. Setelah memperoleh hasil uji beda, dilakukan pengujian hipotesis nonparametrik Man-Whitney untuk menentukan ada atau tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan Sesudah penetapan Peraturan Daerah

No.1 tahun 2002.

1. Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*) terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1998 sampai 2005 akan diolah menggunakan program SPSS 13 untuk menentukan normalitas pendistribusian data tersebut.

Hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yakni nilai *asym.sig (2 tailed)* akan dibandingkan dengan taraf signifikan sebesar 5%. Jika nilai *asym.sig (2 tailed)* lebih besar dari taraf signifikan 5% maka pendistribusian data Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah normal. Sebaliknya jika nilai *asym.sig (2 tailed)* lebih kecil dari taraf signifikan 5% maka pendistribusian data Pajak Kendaraan Bermotor tersebut adalah tidak normal.

2. Uji Beda

Pengujian ini bertujuan menghitung rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah ditetapkannya Peraturan Daerah No.1 tahun 2002.

- a. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum Perda No.1 tahun 2002 :

$$R1 = \frac{N1+N2+N3+N4}{4}$$

Keterangan : N1 : Penerimaan PKB tahun 1998

N2 : Penerimaan PKB tahun 1999

N3 : Penerimaan PKB tahun 2000

N4 : Penerimaan PKB tahun 2001

- b. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setelah Perda No.1 tahun 2002 :

$$R2 = \frac{N1+N2+N3+N4}{4}$$

Keterangan : N1 : Penerimaan PKB tahun 2002

N2 : Penerimaan PKB tahun 2003

N3 : Penerimaan PKB tahun 2004

N4 : Penerimaan PKB tahun 2005

Perhitungan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diatas dapat di tampilkan dalam tabel berikut ini :

<b>PKB Sebelum Perda No.1 Tahun 2002 (Rp)</b>		<b>PKB Setelah Perda No.1 tahun 2002 (Rp)</b>	
1998		2002	
1999		2003	
2000		2004	
2001		2005	
<b>R1</b>		<b>R2</b>	

### 3. Man-Whitney U Test

Penerapan pengujian hipotesis ini terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebelum dan sesudah Peraturan Daerah No.1 tahun 2002 dirancang dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Rumusan hipotesis

H<sub>0</sub>: Tidak Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah

Nomor 1 tahun 2002.

Ha : Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002

b. Menentukan taraf signifikan ( $\alpha$ )

Dalam penelitian ini, taraf signifikan (*level of significance*) sebesar 5%.

c. Menentukan kriteria pengujian hipotesis

Jika probabilitas  $>$  dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima

Jika probabilitas  $<$  dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak.

d. Menghitung nilai hitung U

<b>Penerimaan PKB Sebelum Perda No.1 Tahun 2002</b>	<b>Ranking</b>	<b>Penerimaan PKB Setelah Perda No.1 tahun 2002</b>	<b>Ranking</b>
<b>n1=</b>	<b>T1=</b>	<b>n2=</b>	<b>T2=</b>

$$U1 = n1n2 + \frac{n1(n1+1)}{2} - T1$$

$$U2 = n1n2 + \frac{n2(n2+1)}{2} - T2$$

Nilai hitung pengujian Man-Whitney sampel kecil menggunakan nilai probabilitas (*p-value*) yang ditentukan dengan menggunakan tabel fungsi distribusi U dengan ketentuan digunakan nilai U yang terkecil.

e. Mengambil keputusan

Nilai probabilitas  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya nilai



probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

f. Membuat kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengujian ini ialah:

- 1) Jika  $H_0$  tidak ditolak maka, tidak terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Perda No.1 tahun 2002
- 2) Jika  $H_0$  ditolak maka, terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Perda No.1 tahun 2002.

Pengujian hipotesis Man-Whitney ini juga dapat diproses menggunakan program SPSS 13. Hasil pengujian menggunakan program SPSS ialah nilai *asyp.sig(2-tailed)*. Jika nilai *asyp.sig(2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya jika *asyp.sig(2-tailed)* lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak.

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Geografi**

1. Letak Geografi

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan propinsi yang letaknya paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis terletak diantara  $8^{\circ}$  -  $12^{\circ}$  Lintang Selatan dan diantara  $118^{\circ}$  -  $125^{\circ}$  Bujur Timur. Batas-batas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatsan dengan Laut Flores dan Pulau Sulawesi
- b. Sebelah Selatan berbatsan dengan Laut Timor dan Samudera Hindia.
- c. Sebelah Barat berbatsan dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan
- d. Sebelah Timur berbatsan dengan Negara baru Timor Leste.

2. Luas wilayah

Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki luas daratan kurang lebih  $47.349,2 \text{ km}^2$  dan luas laut  $200.000 \text{ km}^2$  dengan jumlah pulau sebanyak 566 buah pulau (42 pulau berpenghuni dan 524 pulau tidak di huni). Namun sebagian pulau-pulau belum bernama dan tidak berpenduduk. Akan tetapi semua itu merupakan aset bagi pengembangan sektor pariwisata budaya dan lain-lain. Sebagian besar wilayah bergunung dan berbukit hanya sedikit daratan rendah. Terdapat 40 sungai yang

panjangnya berkisar antara 25-118 km dan 11 gunung berapi yang tingginya antara 637 – 2149 meter di atas permukaan laut. Tercatat sejak tahun 1881 sampai 2004 semuanya gunung tersebut pernah meletus.

### 3. Keadaan Iklim

Seperti halnya di daerah lain di Indonesia pada umumnya terdapat dua iklim atau musim yakni musim hujan dan kemarau. Pada bulan juni sampai september terjadi arus angin dari Australia yang tidak banyak mengandung uap air menyebabkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan desember hingga maret terjadi arus angin dari Asia yang mengandung banyak uap air sehingga menimbulkan musim hujan. Daerah Nusa Tenggara Timur sendiri terletak lebih dekat Australia sehingga lebih cenderung mengalami musim kemarau dibandingkan daerah yang dekat dengan Asia. Sehingga daerah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang kering karena curah hujan yang sangat terbatas.

## **A. Kependudukan**

### 1. Jumlah Penduduk

Dilihat dari hasil sensus pada tahun 2004, jumlah penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4.118.774 juta jiwa, dengan kepadatan 88,71 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah daratan Nusa Tenggara Timur yang ialah 47.389,2 Km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1990 sampai tahun 2000 sebesar 1,6% per tahun. Keadaan ini menurun dari periode sebelumnya pada tahun 1970-1980 ialah 1,95% per tahun dan

periode 1981-1990 adalah 1,79% per tahun. Bila dilihat penyebarannya dari total penduduk NTT terbanyak berada pada Kabupaten Manggarai (11,63%), disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat dan Kupang masing-masing mencapai hampir 10%. Sedangkan penduduk yang sedikit berada pada Kabupaten Lembata. Kepadatan penduduk terbesar terdapat pada ibukota propinsi yakni Kota Kupang (1610 jiwa per Km<sup>2</sup>) dan yang terkecil berada pada Kabupaten Sumba Timur (29 jiwa per Km<sup>2</sup>). Berdasarkan agama, maka penduduk Nusa Tenggara Timur mayoritas beragama Kristen. Penganut agama Kristen Katolik sebanyak 54,28%, Kristen Protestan 32,68%, Islam sebanyak 8,90%, Hindu sebanyak 0,23%, Budha 0,20% dan kepercayaan lainnya sebanyak 3,89%.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk di Propinsi Nusa Tenggara Timur masih relatif rendah yaitu 29,34 persen, terutama tamatan SD 7,59 persen tamatan SLTP 7,50 persen tamatan SLTA 1,69 persen tamatan Akademi/Diploma/Universitas 36,72% dan belum tamat SD 17,16 persen. Sarana dan Prasarana pendidikan terdiri dari 3.956 buah terdiri dari SD, 531 buah SMTP, 189 buah SMTA, dan 16 buah Perguruan tinggi. Dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 40.870 orang yang terdiri dari 38.868 orang guru dan 2.002 orang dosen.

## 3. Ketenagakerjaan

Dari sumber data statistik pada tahun 2004 penduduk terbanyak menempati daerah pedesaan. Hal ini disebabkan peluang lapangan

pekerjaan di kota sangat kecil sehingga penduduk lebih memilih untuk pekerjaan bercocok tanam. Namun seiring dengan perkembangan saat ini, lapangan pekerjaan di kota semakin banyak membuat masyarakat pedesaan banyak mencari pekerjaan di kota. Dari hasil Sakernas 2004 diketahui bahwa dari 2.649.757 penduduk NTT berusia 15 tahun ke atas, 77,39% diantaranya merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja yang melakukan aktifitas bekerja sebanyak 95,52% dan sisanya 4,48% aktif mencari pekerjaan. Untuk penduduk yang bekerja sebanyak 1.958.885 orang pada tahun 2004, ternyata 796.015 orang (40,64%) diantaranya sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Pekerja tidak dibayar ini 79,92% diantaranya adalah perempuan.

## **B. Kondisi Wilayah**

### **1. Kekayaan Alam**

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk daerah tropis sehingga banyak daerah beriklim kering. Daerah beriklim kering sangat tidak mudah untuk melakukan kegiatan pertanian sawah karena cuaca yang tidak menentu membuat debit air relatif sangat kecil. Penduduk daerah ini umumnya melakukan kegiatan pertanian tawah kering yang tidak memerlukan pengairan yang banyak. Hasil pertanian ini dapat menjadi sumber pangan pokok bagi masyarakat pedesaan dan juga sekaligus dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan khas/ tradisional yang sangat digemari oleh wisatawan asing maupun domestik.

Selain makanan khas tersebut adapula hasil bumi Nusa Tenggara Timur yang sangat di cari oleh wisatawan luar ialah Kayu Cendana. Terkenal karena wangi yang timbul dari kayu tersebut dan hasil olahan kayu tersebut dapat di jadikan hiasan ataupun cenderamata bagi para wisatawan. Masih banyak lagi hasil kekeayaan alam Nusa Tenggara Timur yang belum dikenal oleh masyarakat luar namun sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

## 2. Bahasa dan Budaya

Karena terdiri dari banyak pulau yang terpisah satu dari yang lain menyebabkan komunikasi penduduk setiap pulau menjadi sulit sehingga setiap daerah memiliki corak budaya yang berbeda. Kurang lebih terdapat 15 bahasa daerah dari 35 suku, masing-masing dengan budayanya sendiri. Seperti motif tenunan daerah maupun kesenian daerah yang tentu berbeda satu sama lain. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat asli Nusa Tenggara Timur terbanyak ialah agama Kristen dan Katolik.

## C. Perekonomian

Dari data yang diperoleh mata pencaharian dan pendapatan penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar (78,02%) mengantungkan hidupnya pada bidang pertanian baik sebagai petani, peternak maupun nelayan, sedangkan prosentase penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian sebesar 21,98% dengan rincian, 9,78% jasa kemasyarakatan, 5,04% industri pengolahan, 4,05% pedagang besar/eceran dan rumah makan, 1,33%

bangunan, 0,87% angkutan pengudangan dan komunikasi, 0,36% pertambangan dan penggalian, 0,17% keuangan, asuransi, usaha persewaan dan bangunan dan 0,13% listrik, gas dan air serta 0,25% kegiatan lainnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8,86%, angka terendah terjadi di Kabupaten Sumba barat (2,49%) dan tertinggi di Kupang (13,62%).

Luas areal perkebunan di Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2004 mencapai 485.645 Ha dengan produksi mencapai 86.044 ton yang terdiri dari jenis komoditas perkebunan kelapa, kopi, cengkeh, coklat, jambu mente, kemiri, kapok, jeruk, vanili, pala, pinang dan tembakau. Sistem berternak di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan cara dilepas, sistem ini membawa dampak terhadap kerusakan lahan dan vegetasi sehingga ada kecenderungan meluasnya lahan kritis. Jumlah ternak di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2004 tercatat sebanyak 11.502.407 ekor. Kegiatan usaha perikanan di Propinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi perikanan laut. Jumlah Rumah Tangga (RT) usaha perikanan laut berdasarkan katagori usaha terdiri dari 5.304 RT tanpa perahu, 14.968 RT perahu tanpa motor, 730 RT perahu motor tempel dan 836 RT kapal motor. Kegiatan perikanan di Propinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2005 dapat menghasilkan ikan sebanyak 64.873,5 ton yang terdiri dari 64.169,50 ton perikanan laut dan 704 ton perikanan darat. Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terkait pada sektor perikanan sebanyak 31.753 RT yang terdiri dari 21.838 RT di perikanan laut dan sebanyak 9.915

RT di perikanan darat.

Produksi hasil hutan kayu terdiri dari 18.928,207 m<sup>2</sup> kayu yang terdiri dari kayu rimba dan jati 187.616 kg, kayu kuning, kayu manis, gaharu dan arang 246,114 ton, kayu cendana 8.038 m<sup>3</sup>. Produksi Hasil hutan Non kayu terdiri dari 15.589,5 ton asam dan kemiri 79.115 kg siri hutan, pinang iris, lilin, kunyit, kulit kayu manis, rotan dan kencur 2.0491,00 liter madu

#### **E. Pemerintahan**

Dari perkembangan terakhir tahun 2006, Propinsi Nusa Tenggara timur terdiri dari 15 kabupaten dan 1 kota madya, 203 kecamatan dan 2.742 desa/kelurahan. Kelurahan terbanyak terdapat pada kabupaten Manggarai sebanyak 254 desa/kelurahan. Sedangkan yang paling sedikit jumlahnya pada kota kupang sebanyak 45 desa/kelurahan (data nama kabupaten dapat dilihat pada tabel 4.1). Propinsi Nusa Tenggara Timur beribukota di Kupang dengan kepala pemerintahan adalah Gubernur. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota seluruh Nusa Tenggara Timur pada tahun 2002 sebanyak 90.436 orang. Dari sejumlah itu 26.958 orang diantaranya merupakan PNSD guru. Dari total PNSD sebanyak 90.436 orang, 6.650 orang atau sekitar 7% diantaranya adalah PNSD di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bila diamati setiap kabupaten/ kota, jumlah PNSD terbanyak dan bahkan hampir dua kali lipat jumlah PNSD pemerintah propinsi adalah Kabupaten Manggarai sebanyak 12.104 orang. Kabupaten lain yang jumlah PNSD



melebihi PNSD pemerintah propinsi adalah Kabupaten Kupang, TTS dan Belu. Sementara jumlah PNSD yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Lembata.

Berikut adalah tabel 4.1 berisi tentang nama kabupaten beserta ibukotanya masing-masing dalam propinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 4.1 Nama Kabupaten dan Ibukotanya**

<b>Kabupaten/ Kota Madya</b>	<b>Ibukota</b>
Kota Madya Kupang	Kupang
Kabupaten Kupang	Sulamu
Kabupaten Timor Tengah Selatan	Soe
Kabupaten Timor Tengah Utara	Kefa
Kabupaten Belu	Atambua
Kabupaten Alor	Kalabahi
Kabupaten Flores Timur	Larantuka
Kabupaten Sikka	Maumere
Kabupaten Ende	Ende
Kabupaten Ngada	Bajawa
Kabupaten Manggarai Timur	Ruteng
Kabupaten Manggarai Barat	Labuan Bajo
Kabupaten Sumba Timur	Waingapu
Kabupaten Sumba Barat	Waikabubak
Kabupaten Lembata	Lewoleba
Kabupaten Rote Ndao	Rote

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan disajikan data dan informasi yang dikumpulkan selama penelitian, analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan serta pembahasan yang menjelaskan hasil analisis tersebut.

#### **A. Deskripsi Data**

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

1. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah propinsi NTT,
2. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan bermotor periode tahun 1998 sampai tahun 2005.
3. Beberapa Peraturan Daerah yang diambil sebagai acuan yakni Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2002 dan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah dan data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002 yakni Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 1998 sampai 2001, dan sesudah penetapan Peraturan Daerah tersebut yakni periode 2002 sampai 2005.

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Sebelum Penetapan Perda No.1 tahun 2002 :

**Tabel 5.1 Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Perda No.1 Tahun 2002**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor
1998	Rp 4.663.886.136
1999	6.150.143.513
2000	6.725.777.550
2001	10.827.702.275

**Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah sebelum Perda No.1 Tahun 2002**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1998	Rp17.629.583.480
1999	20.489.967.169
2000	20.063.358.558
2001	43.027.073.324

## 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah

Sesudah Penetapan Perda No.1 tahun 2002 :

**Tabel 5.3 Pajak Kendaraan Bermotor sesudah Perda No.1 Tahun 2002**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor
2002	Rp14.311.254.579
2003	16.901.738.620
2004	24.179.240.404
2005	26.920.260.095

**Tabel 5.4 Pendapatan Asli Daerah sesudah Perda No.1 Tahun 2002**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2002	Rp 81.563.073.170
2003	85.569.083.670
2004	123.690.370.078
2005	140.629.071.361

## B. Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh tersebut di atas digunakan dalam analisis permasalahan berikut ini :

1. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002

Untuk mengetahui besar prosentase kontribusi atau pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan asli daerah digunakan rumus :

$$C_n = \frac{P_x n}{P_y n} \times 100\%$$

Keterangan :

$C_n$  : Kontribusi PKB terhadap PAD

$P_x$  : Penerimaan PKB

$P_y$  : Penerimaan PAD

$n$  : Tahun tertentu

Dari rumus di atas dapat dihitung besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun anggaran 1998 sampai tahun 2005 sebagai berikut :

- a. Prosentase kontribusi tahun 1998 ialah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp}4.663.886.136}{\text{Rp}17.629.583.480} \times 100\% \\ &= 26,45\% \end{aligned}$$

- b. Prosentase kontribusi tahun 1999 ialah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp}6.150.143.513}{\text{Rp}20.489.967.169} \times 100\% \\ &= 30,01\% \end{aligned}$$

c. Prosentase kontribusi tahun 2000 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}6.725.777.550}{\text{Rp}20.063.358.558} \times 100\%$$
$$= 33,5\%$$

d. Prosentase kontribusi tahun 2001 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}10.827.702.275}{\text{Rp}43.027.073.324} \times 100\%$$
$$= 25,2\%$$

e. Prosentase kontribusi tahun 2002 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}14.311.254.579}{\text{Rp}81.562.073.170} \times 100\%$$
$$= 17,5\%$$

f. Prosentase kontribusi tahun 2003 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}16.901.738.620}{\text{Rp}85.569.083.670} \times 100\%$$
$$= 19,7\%$$

g. Prosentase kontribusi tahun 2004 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}24.179.240.404}{\text{Rp}123.690.370.078} \times 100\%$$
$$= 19,5\%$$

h. Prosentase kontribusi tahun 2005 ialah :

$$= \frac{\text{Rp}26.920.260.095}{\text{Rp}140.629.071.361} \times 100\%$$
$$= 19,1\%$$

Hasil perhitungan prosentase kontribusi tersebut dapat di lihat lebih jelas pada tabel 5.5 berikut, yang menunjukkan peningkatan atau penurunan

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1998 sampai tahun 2005.

**Tabel 5.5. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>	<b>Kontribusi Meningkat / menurun</b>
1998	4.663.886.136	17.629.583.480	26,4%	-
1999	6.150.143.513	20.489.967.169	30,0%	Meningkat 3,6%
2000	6.725.777.550	20.063.358.558	33,5%	Meningkat 3,5%
2001	10.827.702.275	43.027.073.324	25,2%	Menurun 7,6%
2002	14.311.254.579	81.563.073.170	17,5%	Menurun 7,7%
2003	16.901.738.620	85.569.083.670	19,7%	Meningkat 2,2%
2004	24.179.240.404	123.690.370.078	19,5%	Menurun 0,2%
2005	26.920.260.095	140.629.071.361	19,1%	Menurun 0,4%

Berdasarkan tabel tersebut, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 1998 sebesar Rp4.663.886.136 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17.629.583.480, berarti kontribusi PKB terhadap PAD sebesar 26,4%. Tahun 1999 penerimaan PKB meningkat menjadi Rp6.150.143.513 dan PAD sebesar Rp20.489.967.169, sehingga membuat prosentase kontribusinya meningkat 3,6% menjadi 30%. Pada tahun 2000 penerimaan PKB sebesar Rp6.725.777.550 dan PAD sebesar Rp20.063.358.558 membuat kontribusi penerimaan PKB terhadap PAD meningkat sebesar 3,5% menjadi 33,5%. Tahun 2001 penerimaan PKB dan PAD meningkat cukup besar menjadi Rp10.827.702.275 dan Rp43.027.073.324, namun kontribusi PKB terhadap PAD menurun 7,6% menjadi 25,2%.

Pada tahun 2002 terjadi pergantian Peraturan Daerah tentang Pajak

Kendaraan Bermotor sehingga menghasilkan penerimaan PKB saat itu sebesar Rp14.311.254.579 dan PAD meningkat menjadi Rp81.563.073.170 berarti kontribusinya menurun 7,7% menjadi 17,5%. Tahun 2003 penerimaan PKB sebesar Rp16.901.738.620, PAD sebesar Rp85.569.083.670 dan kontribusinya 19,7% berarti meningkat 2,2%. Pada tahun 2004 penerimaan PKB sebesar Rp24.179.240.404, PAD sebesar Rp123.690.370.078 dan kontribusi menurun 0,2% menjadi 19,5%. Tahun 2005 penerimaan PKB sebesar Rp26.920.160.095, PAD sebesar Rp140.629.071.361 dan kontribusi yang dihasilkan sebesar 19,1% yang berarti menurun 0,4%.

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002

Pembahasan masalah kedua tentang ada atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002, memerlukan beberapa langkah-langkah atau tahapan pengujian. Pengujian pertama dengan uji normalitas (*One-Sample Konglomorv-Smirnov Test*), pengujian kedua dengan uji beda dan pengujian ketiga dengan pengujian hipotesis nonparametrik Man-Whitney.

a. Uji Normalitas (*One-Sample Konglomorv-Smirnov Test*)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis pendistribusian data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 1998

sampai tahun 2005. Uji *One-Sample Konglomorv-Smirnov* akan menentukan normal atau tidak normal pendistribusian data tersebut.

Berikut adalah tabel 5.6 berisi tentang penerimaan Pajak Kendaraan selama tahun 1998 sampai tahun 2005.

**Tabel 5.6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>
1998	Rp4.663886.136
1999	6.150.143.513
2000	6.725.777.550
2001	10.827.702.275
2002	14.311.254.579
2003	16.901.738.620
2004	24.179.240.404
2005	26.920.260.095

Pengujian normalitas data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1998 sampai tahun 2005 menggunakan pengujian *One-Sample Konglomorv-Smirnov* dengan bantuan program SPSS 13. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Descriptive Statistics**

Penerimaan PKB tahun 1998-2005				
N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
8	13835000396.50	8371808796.359	4663886136	26920260095

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Penerimaan PKB tahun 1998-2005
N		8
Normal Parameters(a,b)	Mean	13835000396.50
	Std. Deviation	8371808796.359
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.177
	Negative	-.142
Kolmogorov-Smirnov Z		.501
Asymp. Sig. (2-tailed)		.963

- a Test distribution is Normal.
- b Calculated from data.



Hasil uji *One-Sample Konglomorv-Smirnov* menunjukkan nilai *asym.Sig (2-tailed)* ialah 0,963. Hal ini berarti nilai *asym.Sig (2-tailed)* 0,963 lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama tahun 1998 sampai tahun 2005 berdistribusi normal.

b. Uji Beda

Setelah pengujian normalitas di atas, langkah selanjutnya ialah uji beda. Pengujian ini dimaksudkan agar mengetahui rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tersebut.

1) Menentukan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Perda

No.1 tahun 2002 :

$$R1 = \frac{N1+N2+N3+N4}{4}$$

$$= \frac{Rp4.663.886.136+6.150.143.513+6.725.777.550+10.827.702.275}{4}$$

$$= Rp7.091.877.369$$

2) Menentukan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Perda

No.1 tahun 2002 :

$$R2 = \frac{N1+N2+N3+N4}{4}$$

$$= \frac{Rp14.311.254.579+16.901.738.620+24.179.240.404+26.920.260.095}{4}$$

$$= Rp20.578.123.425$$

Hasil perhitungan rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

diatas dapat ditampilkan dalam tabel 5.7 berikut ini:

**Tabel 5.7. Rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sebelum dan Sesudah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002**

<b>Penerimaan PKB Sebelum Perda No.1 Tahun 2002 (R1)</b>		<b>Penerimaan PKB Setelah Perda No.1 tahun 2002 (R2)</b>	
1998	Rp4.663.886.136	2002	Rp14.311.254.579
1999	6.150.143.513	2003	16.901.738.620
2000	6.725.777.550	2004	24.179.240.404
2001	10.827.702.275	2005	26.920.260.095
<b>R1</b>	<b>Rp7.091.877.369</b>	<b>R2</b>	<b>Rp20.578.123.425</b>

c. Man-Whitney U Test

Pengujian hipotesis nonparametrik ini bertujuan menentukan ada atau tidak ada perbedaan antara rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tahap pengujian hipotesis ini dibuat sebagai berikut

1) Rumusan hipotesis

$H_0$  : Tidak Ada perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002.

$H_a$  : Ada perbedaan antara rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002.

2) Nilai kritis pengujian ini menggunakan  $\alpha = 5\% = 0,05$

3) Kriteria pengujian, jika nilai probabilitas  $>$  dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$

diterima dan jika nilai probabilitas < dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak.

4) Nilai Hitung U

**Tabel 5.8 Pengujian Nilai Distribusi U**

<b>Penerimaan PKB Sebelum Perda No.1 Tahun 2002</b>	<b>Ranking</b>	<b>Penerimaan PKB Setelah Perda No.1 tahun 2002</b>	<b>Ranking</b>
Rp 4.663.886.136	1	Rp14.311.254.579	5
6.150.143.513	2	16.901.738.620	6
6.725.777.550	3	24.179.240.404	7
10.827.702.275	4	26.920.260.095	8
	<b>T1=10</b>		<b>T2=26</b>

$$\begin{aligned}
 U_1 &= n_1 n_2 + n_1(n_1+1)/2 - T_1 \\
 &= (4)(4) + \{4(4+1)/2\} - 10 \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U_2 &= n_1 n_2 + n_2(n_2+1)/2 - T_2 \\
 &= (4)(4) + \{4(4+1)/2\} - 26 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

5) Keputusan

Nilai hitung U terkecil ialah 0. Nilai  $U = 0$ , maka probabilitasnya adalah 0,0143 (Sesuai tabel fungsi distribusi U) Pengujian ini menggunakan  $\alpha = 5\%$  atau 0,05, dengan demikian nilai probabilitas = 0,0143 lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$ , berarti keputusan dalam pengujian ini adalah menolak  $H_0$ .

6) Kesimpulan

Pada langkah keputusan, pengujian ini diputuskan menolak  $H_0$ . Dengan demikian kesimpulannya ialah terdapat perbedaan antara

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengujian hipotesis ini juga dapat dihitung menggunakan bantuan program SPSS 13. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh nilai *asympt.sig(2-tailed)*. Jika nilai *asympt.sig(2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya jika *asympt.sig(2-tailed)* lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , maka  $H_0$  ditolak.

Pengujian *Man-Whitney U Test* menggunakan program SPSS 13 memperoleh hasil sebagai berikut :

	group	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PKB 98-05	sebelum	4	2.50	10.00
	sesudah	4	6.50	26.00
	Total	8		

	PKB 98-05
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	10.000
Z	-2.309
Asymp. Sig. (2-tailed)	.021
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.029(a)

a Not corrected for ties.

b Grouping Variable: group

Hasil pengujian dalam tabel diatas menunjukkan nilai *asympt.sig (2-tailed)* adalah 0,021, yang berarti nilai *asympt.sig (2-tailed)* = 0,021 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dengan demikian keputusan yang diambil ialah menolak  $H_0$ . Kesimpulannya ialah terdapat

perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002**

Hasil perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005 menunjukkan bahwa, peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun tidak selalu berpengaruh positif terhadap peningkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat diketahui dari naik turunnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1998 sampai 2005.

Pada tahun 1998 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,4% meningkat 3,4% pada tahun 1999 menjadi 30%. Pada tahun 2000 meningkat 3,5% menjadi 33,5% namun terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2001 menjadi 25,2% atau menurun 7,6%. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 karena adanya peningkatan penerimaan pajak dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang cukup besar pada

tahun tersebut. Sehingga hal ini yang menyebabkan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan.

Pada awal tahun 2002 terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Peraturan Daerah No.2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menjadi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Namun perubahan tersebut tidak mampu mempengaruhi peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002. Terjadi penurunan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yakni pada tahun 2001 memiliki kontribusi sebesar 25,2% dan pada tahun 2002 kontribusi tersebut menurun menjadi 17,5% dengan penurunan kontribusi sebesar 7,7%. Faktor penurunan kontribusi juga terjadi akibat peningkatan pajak di sektor lain yang meningkat cukup besar.

Pada tahun 2003, kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ialah sebesar 19,7%, atau meningkat 2,2% dari tahun 2002 yang memiliki kontribusi sebesar 17,5%. Hal ini dipicu oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang sangat meningkat khususnya jenis sepeda motor yang bertambah jumlahnya. Peningkatan jumlah penjualan sepeda motor menyebabkan meningkatnya

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima pada tahun tersebut. Pada tahun 2004 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah menurun 0,2%, disebabkan karena peningkatan pajak disektor lain. Kontribusi yang sama menurun 0,4% pada tahun 2005, sehingga Pajak Kendaraan Bermotor hanya mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,1%.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi fluktuasi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005, disebabkan adanya faktor lain seperti peningkatan pajak lainnya dan jumlah obyek pajak yang sangat mempengaruhi kontribusi tersebut. Sehingga walaupun selalu terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun, namun belum dapat dipastikan akan mempengaruhi peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Perbedaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002
  - a. Uji Normalitas (*One-Sample Konglomorv-Smirnov Test*)

Hasil pengujian ini menunjukkan pendistribusian data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah normal. Pada tabel pertama menjelaskan informasi deskriptif tentang data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama 8 tahun (N), yakni sejak tahun 1998 sampai tahun 2005. Rata-rata hitungnya (mean) ialah senilai

Rp13.835.000.396,50 dan standar deviasi senilai Rp8.371.808.796,359. Pada tabel kedua menginformasikan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yakni nilai *asym.Sig (2-tailed)* ialah 0,963. Nilai *asym.sig (2-tailed)* 0,963 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 berarti data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah data berdistribusi normal.

b. Uji Beda

Pengujian ini dimaksud untuk menentukan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah No.1 tahun 2002. Hasil pengujian yang di dapat ialah rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Penetapan Peraturan Daerah tersebut ialah Rp7.091.877.369 dan sesudah penetapan Peraturan Daerah tersebut ialah Rp20.578.098.425.

c. Man-Whitney U Test

Pengujian hipotesis terhadap beda dua rata-rata dengan Man-Whitney U Test memerlukan tahap-tahap pengujian. Langkah awal ialah menentukan rumusan hipotesis. Selanjutnya menentukan nilai kritis pengujian atau taraf signifikan yakni  $5\% = 0,05$ . Kriteria pengujiannya ialah jika nilai probabilitas (sesuai tabel fungsi distribusi U) lebih besar ( $>$ ) dari nilai kritis 5%, maka  $H_0$  diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil ( $<$ ) dari nilai kritis 5%, maka  $H_0$  ditolak.

Besar nilai probabilitas diketahui dengan menentukan nilai hitung



U yang terkecil. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai hitung U yang terkecil ialah 0. Dengan demikian sesuai tabel fungsi distribusi U, nilai probabilitasnya diketahui sebesar 0,0143. Nilai probabilitas 0,0143 lebih kecil dari nilai kritis 5% = 0,05, sehingga keputusan dalam pengujian ini adalah menolak  $H_0$ . Berdasarkan keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengujian Man-Whitney U menggunakan bantuan program SPSS 13 diperoleh nilai *asympt.sig(2-tailed)* sebesar 0,021 yang berarti nilai *asympt.sig(2-tailed)* = 0,021 lebih kecil dari nilai kritis 5% = 0,05, sehingga keputusan yang diambil ialah menolak  $H_0$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum penetapan Perda No.1 pada tahun 2002, yakni pada tahun 1998 sebesar 26,4%, tahun 1999 sebesar 30,01%, tahun 2000 sebesar 33,5% dan tahun 2001 sebesar 25,2%. Setelah penetapan Perda No.1 tahun 2002, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 sebesar 17,5%, tahun 2003 sebesar 19,7%, tahun 2004 sebesar 19,5% dan tahun 2005 sebesar 18,6%.
2. Hasil Man-Whitney U Test menunjukkan nilai *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05, sehingga keputusan yang diambil ialah menolak  $H_0$ , yang berarti adanya perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Mengacu pada pembahasan atas penelitian yang dilakukan, peneliti

menyadari adanya kemampuan yang terbatas sehingga terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat dimaklumi, antara lain :

1. Data penelitian ini hanya mencakup penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1998 sampai tahun 2005, dan tidak menyertakan secara rinci faktor lain yang mempengaruhi penerimaan tersebut seperti memperhitungkan juga kenaikan jumlah penerimaan pajak disektor lainnya.
2. Terdapat perbedaan penyajian jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah karena tidak diketahui secara pasti besar jumlah potongan Pajak Kendaraan Bermotor di tiap-tiap kabupaten.
3. Perhitungan rata-rata Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Perda No.1 tahun 2002 tidak memperhatikan peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.

#### **A. Saran**

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur, disini penulis ingin menyampaikan beberapa masukan yang diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus dapat membantu terlaksananya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena pendapatan tersebut sangat diperlukan untuk pembangunan daerah selanjutnya. Saran atau masukan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Propinsi NTT dapat membuat suatu format laporan penerimaan Pajak yang mencantumkan prosentase kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah agar diketahui tingkat kinerja setiap penerimaan pajak.
2. Diharapkan tiap pemerintah kabupaten melaporkan besarnya potongan pajak atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar tidak terjadi kesalahan penafsiran pada laporan taget dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dalam menghitung perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat memperhitungkan kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan.H, 1985, *Perpajakan*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Algifari, 2003, *Statistika Induktif*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Aliandu, Johanes dan Patty, Noach, Agustina, 2001, *Profil Statistik dan Indikator Gender di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Anonim, 2005, *NTT dalam Angka*, Kupang, Badan Pusat Statistik Propinsi NTT.
- Kaho, Riwu, 1982, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mardiasmo, 2002, *Perpajakan*, Yogyakarta , Penerbit Andi.
- Nugroho, Bhuono, Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakosa, B Kesit, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII Press.
- Purwanto, S.K, Suhardi, 2004, *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan modern*, Jakarta Salemba Empat.
- Republik Indonesia, 1998, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Republik Indonesia, 2002, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
- Republik Indonesia, 2001, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Spillane, James J, 2004, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pariwisata.
- Sugiyono, 2003, *Statistik Untuk Penelitian*, Edisi Kelima, Bandung, Alpa Beta.
- Wahab, Abdul.S dan Putra, Fadilah, 2002, *Masa Depan Otonomi Daerah*, Surabaya, SIC.
- Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## **LAMPIRAN**

Menentukan nilai Z hitung

<b>Penerimaan PKB Sebelum Perda No.1 Tahun 2002</b>	<b>Rangking</b>	<b>Penerimaan PKB Setelah Perda No.1 tahun 2002</b>	<b>Rangking</b>
Rp.4.663.886.136	1	Rp.14.311.254.579	5
Rp.6.150.143.513	2	Rp.16.901.738.620	6
Rp.6.725.777.550	3	Rp.24.179.240.404	7
Rp.10.827.702.275	4	Rp.26.920.160.095	8
	<b>T1=10</b>		<b>T2=26</b>

$T1 = 10$ , maka nilai rata-rata  $T1(\mu T1) = n1(n+1)/2$

$$= 4(8+1)/2 = 18$$

Standar deviasinya ialah :

$$\sigma T1 = \sqrt{n1n2(n+1)/12}$$

$$= \sqrt{(4)(4)(8+1)/12}$$

$$= \sqrt{16(9)/12}$$

$$= \sqrt{144/12}$$

$$= \sqrt{12}$$

$$= 3,464$$

$$Z \text{ hitung} = T1 - \mu T1 / \sigma T1$$

$$= 10 - 18 / 3,464$$

$$= -8 / 3,464$$

$$= -2,309$$

DATA : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH PROPINSI NTT  
LIMA TAHUN ANGGARAN ( 1998/1999 S/D 2002 ).

JENIS PENERIMAAN	1998		1999		2000		2001		2002	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pendapatan	133,088,534,000	132,438,172,104	215,401,000,000	192,859,988,333	174,386,832,681	183,272,428,371	341,144,088,000	354,382,228,083	437,275,000,000	508,228,888,000
Bagian Perhitungan Angg. Thn Lalu	7,511,331,920	7,511,331,920	9,588,552,333	9,533,552,333	2,078,512,657	10,481,912,811	24,240,219,395	24,308,388,033	140,334,877,445	140,822,288,433
P A D	18,354,811,240	17,829,583,480	19,667,035,867	20,489,967,189	15,148,340,343	20,063,358,558	31,418,428,805	43,027,073,324	67,828,082,815	81,582,073,177
Pajak Daerah	7,430,000,000	6,891,110,478	8,880,000,000	9,782,470,314	7,300,000,000	12,781,288,000	15,685,000,000	21,643,253,815	33,075,000,000	40,889,748,111
- PKB	4,930,000,000	4,663,888,138	5,835,000,000	6,150,143,513	5,850,800,000	6,725,777,550	9,385,000,000	10,827,702,275	13,000,000,000	14,311,254,577
- BBN-KB	2,500,000,000	1,822,533,365	2,445,000,000	3,357,791,872	2,000,000,000	5,719,822,025	6,000,000,000	10,344,827,875	11,500,000,000	17,387,548,077
- PBBKB	-	-	800,000,000	284,534,929	300,000,000	335,588,425	300,000,000	470,723,585	8,475,000,000	228,281,277
- PBHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-
RETRIBUSI	8,402,738,000	8,187,335,188	8,298,448,000	8,189,834,718	8,105,500,000	5,287,213,188	10,252,018,000	8,384,231,588	14,348,208,480	13,083,148,111
Bdg. Laba Usaha Dee.	578,648,000	510,488,474	100,000,000	100,000,000	100,000,000	4,000,000	1,700,000,000	2,654,181,288	4,340,000,000	4,288,187,777
Lain-lain Pendapatan	1,945,424,240	2,240,649,344	2,387,588,867	2,427,882,137	1,842,840,343	2,010,857,360	3,779,408,605	10,385,408,857	15,585,884,135	23,332,887,077
Bag. Dana Perimb.	107,222,380,840	107,297,258,704	186,145,412,000	182,838,488,831	157,181,979,681	152,747,158,902	188,488,514,000	188,058,827,728	258,824,228,840	284,084,347,888
Bagi Hasil Pajak	5,100,000,000	5,485,880,570	5,105,000,000	6,880,402,551	5,285,000,000	8,815,283,517	11,485,300,000	15,814,689,814	14,838,100,000	18,878,881,077
Bagi Hasil Bukan Pjk	2,578,000,000	3,202,533,351	2,578,000,000	2,535,282,134	4,100,000,000	3,789,547,578	4,100,000,000	1,211,943,912	187,128,840	77,488,888
D A U	24,051,790,840	23,404,482,783	38,788,941,000	34,834,582,941	43,824,979,681	38,213,858,807	150,833,214,000	150,833,214,000	244,030,000,000	244,030,000,000
D A K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Penerimaan	75,494,800,000	75,224,800,000	141,897,471,000	118,808,201,205	103,872,000,000	101,828,368,000	118,888,828,000	118,888,828,000	20,280,000,000	20,280,000,000

Kepala Sub Dinas Penagihan,

**Drs. PIUS LUKAS**  
NIP. 620 016 015

Kupang, 12 September 2003.  
Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi,


**SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, Msi**  
NIP. 620 022 517




DATA : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH PROPINSI NTT  
LIMA TAHUN ANGGARAN ( 1999/2000 S/D 2003 ).

NO	JENIS PENERIMAAN	1999		2000		2001		2002		2003	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
I	Pendapatan	215,401,000,000	192,859,988,333	174,386,832,681	163,272,428,371	341,144,089,000	354,382,226,083	437,275,000,000	506,228,886,000	403,570,500,000	405,393,222,44
	Bagian Perhitungan Angg. Thn Lalu	9,588,552,333	8,533,552,333	2,076,512,657	10,461,912,911	24,240,219,395	24,306,396,033	140,334,677,445	140,922,265,437	-	-
II	P A D	19,667,035,667	20,489,967,169	15,148,340,343	20,063,358,558	31,416,426,605	43,027,073,324	67,826,092,615	81,562,073,170	96,736,849,175	95,568,083,67
	Pajak Daerah	8,880,000,000	8,792,470,314	7,300,000,000	12,781,288,000	15,685,000,000	21,643,253,815	33,075,000,000	40,869,748,198	48,071,400,000	52,005,307,72
	- PKB	5,835,000,000	6,150,143,513	5,850,800,000	6,725,777,550	9,385,000,000	10,827,702,275	13,000,000,000	14,311,254,579	16,954,600,000	16,901,738,62
	- BBN-KB	2,445,000,000	3,357,791,872	2,000,000,000	5,719,922,025	6,000,000,000	10,344,827,675	11,500,000,000	17,387,546,080	18,816,800,000	20,962,583,70
	- PBBKB	600,000,000	284,534,929	300,000,000	335,588,425	300,000,000	470,723,565	8,475,000,000	225,281,356	12,000,000,000	13,801,593,10
	- Pajak KAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,808,92
	- BBN KAA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,619,20
	- PBHTB	-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	300,000,000	336,988,11
	RETRIBUSI	8,299,449,000	8,169,834,718	6,105,500,000	5,267,213,198	10,252,018,000	8,384,231,586	14,345,208,480	13,093,140,148	13,925,812,000	11,554,995,71
	Bag. Laba Usaha Dae.	100,000,000	100,000,000	100,000,000	4,000,000	1,700,000,000	2,654,181,266	4,340,000,000	4,266,187,728	5,495,936,600	5,495,936,60
	Lain-lain Pendapatan	2,387,586,667	2,427,662,137	1,642,840,343	2,010,857,360	3,779,408,605	10,365,406,657	15,585,884,135	23,332,997,096	19,243,700,575	16,512,84
III	Bag. Dana Perimb.	186,145,412,000	162,836,468,831	157,161,979,681	152,747,156,902	166,498,514,000	168,058,827,726	258,824,229,940	264,084,347,696	307,086,743,825	312,167,188,52
	Bagi Hasil Pajak	5,105,000,000	8,660,402,551	5,265,000,000	8,815,283,517	11,465,300,000	15,914,669,814	14,639,100,000	19,976,881,061	18,056,743,825	22,431,088,77
	Bagi Hasil Bukan Pjk	2,576,000,000	2,535,282,134	4,100,000,000	3,789,547,578	4,100,000,000	1,211,943,912	157,129,940	77,456,635	-	-
	D A U	36,788,941,000	34,834,582,941	43,824,978,681	38,213,956,807	150,933,214,000	150,933,214,000	244,030,000,000	244,030,000,000	283,040,000,000	289,738,088,71
	D A K	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000,000	-
	Lain-lain Penerimaan	141,697,471,000	116,806,201,205	103,972,000,000	101,928,369,000	118,988,929,000	118,988,929,000	20,290,000,000	20,290,000,000	9,736,907,000	7,656,852,21

Kepala Sub Dinas Penghasilan,

  
**Drs. PIUS LUKAS**  
NIP. 620 018 015

Kupang, 25 Maret 2004.  
Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi,

  
**SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos.Maj**  
NIP. 620 022 517

**DAFTAR: TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) TAHUN 2004, 2005 DAN 2006**

Sumber:

No	Uraian	Tahun 2004			Tahun 2005			Tahun 2006		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	PAD	Rp112.719.183.377	Rp123.690.370.078	109,73	Rp138.643.122.822	Rp140.629.071.361	101,43	Rp175.577.966.000	Rp175.951.829.851	100,21
1	Pajak Daerah	Rp64.869.500.000	Rp76.778.923.312	118,36	Rp82.925.500.000	Rp85.548.574.022	103,16	Rp104.054.700.200	Rp101.615.739.485	97,66
	a. PKB	Rp22.684.000.000	Rp24.179.240.404	106,59	Rp29.660.700.000	Rp26.920.260.095	90,76	Rp31.289.900.200	Rp29.719.755.220	94,98
	b. BBNKB	Rp27.800.500.000	Rp35.484.660.461	127,64	Rp31.864.800.000	Rp35.372.930.450	111,01	Rp31.864.800.000	Rp29.179.919.400	91,57
	c. PBB-KB	Rp14.000.000.000	Rp16.651.055.124	118,94	Rp21.000.000.000	Rp22.967.408.048	109,37	Rp40.500.000.000	Rp42.235.692.534	104,29
	d. PAB-AP	Rp375.000.000	Rp463.967.323	123,72	Rp400.000.000	Rp287.975.429	71,99	Rp400.000.000	Rp480.372.331	120,09
2	Retribusi Daerah	Rp17.984.337.000	Rp16.680.809.983	92,75	Rp20.650.839.000	Rp19.962.622.354	96,67	Rp30.607.401.000	Rp27.074.632.841	88,46
3	Bagian laba BUMD	Rp3.895.000.000	Rp8.894.560.752	100,00	Rp12.750.000.000	Rp13.433.343.840	105,36	Rp10.900.472.337	Rp10.500.472.337	96,33
4	Lain-lain Penerimaan	Rp20.970.346.377	Rp21.336.076.031	101,74	Rp22.316.783.822	Rp21.684.531.145	97,17	Rp30.015.392.363	Rp36.760.985.188	122,47

Keterangan:

PAP: Pendapatan asli Propinsi  
 PKB: Pajak Kendaraan Bermotor  
 BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
 PBB-KB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
 PAB-AP: Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

A.n. Kepala Dinas Pendapatan daerah Prov NTT  
 Kepala Bagian tata Usaha,  
  
 Drs. Nico Hayon  
 Pembina Tk. I  
 NIP 620 010 301